

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di Indonesia menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh bidang-bidang lainnya. Salah satu aspek dari pembangunan ekonomi adalah pengembangan sektor moneter di banyak negara, yang memiliki peranan penting di dalam memacu pembangunan dengan mempengaruhi pengadaan kredit, pengendalian inflasi dan dengan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Sektor moneter perlu dikembangkan, karena dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan perekonomian. Semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunan semakin besar dan penting sistem keuangan, karena kemajuan perekonomian ini akan meningkatkan penggunaan uang dalam masyarakat

Bank sebagai salah satu bagian dari sistem moneter mempunyai peranan dalam perekonomian dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain : sebagai lembaga perantara keuangan, lembaga pencipta kredit dan uang, sebagai sumber penghasilan dan pencipta lapangan kerja, sebagai pemasok aneka jasa dan sebagainya.

Lembaga perantara keuangan bank, mempunyai manfaat bagi kemakmuran bangsa selama sistem perbankan berfungsi dengan baik

sehingga sistem perbankan dalam perekonomian dalam keadaan sehat. Akan tetapi kalau terjadi sebaliknya, misalnya sebuah bank atau beberapa bank yang memiliki pangsa pasar cukup besar mengalami kesulitan likuiditas, maka dapat terjadi perekonomian dilanda panik perbankan. Panik perbankan tersebut pada gilirannya dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian (Soediyono rekyoprayitno, 1992 : 131).

Bisnis bank mempunyai cakupan cukup luas dan jasa-jasa yang diberikan juga banyak. Beberapa inovasi dalam perbankan adalah penerbitan kartu kredit, ikut serta dalam dalam pasar eudollar dan lock box banking. Selain itu banyak bank yang menggunakan tehnik-tehnik manajemen untuk memperbaiki jasa-jasa finansil yang diberikan. Di Indonesia pada awal 1980-an bisnis bank tidak bisa dipacu perkembangannya, karena belum membudidayanya kebiasaan menabung dalam masyarakat dan belum ada kebutuhan dipihak pemerintah untuk melonggarkan berbagai ketentuan yang menyangkut sektor ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, menempuh berbagai langkah deregulasi dibidang moneter, keuangan dan perbankan yang dimulai dengan paket kebijaksanaan 1 Juni 1983, yang intinya mengatur penghapusan pagu kredit, pemberian kebebasan bagi bank untuk menentukan suku bunga pinjaman dan deposito berjangka serta pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan bank harus bersaing dalam memobilisasi dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam bentuk

kredit. Persaingan ini mendorong masing-masing bank untuk lebih mandiri dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta melakukan upaya lainnya.

Pada periode sebelum 1 Juni 1983, dunia perbankan ditandai dengan adanya dana murah yang berasal dari anggaran negara dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena peningkatan penerimaan pemerintah dari lonjakan harga minyak telah meningkatkan dana pembangunan yang disalurkan ke sektor riil melalui sektor perbankan. Periode sebelum 1 Juni 1983 juga ditandai kebijakan pemerintah yang bersifat kontrol langsung seperti kebijakan pagu kredit dan penentuan suku bunga deposito. Dengan pagu bunga dana pihak ketiga yang semakin rendah telah menyebabkan sangat sedikit dana yang tersedia dalam masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga bank pada khususnya dan lembaga-lembaga keuangan pada umumnya. Di lain pihak terlalu rendahnya suku bunga kredit telah menyebabkan kelebihan permintaan akan kredit. Untuk mengatasi masalah pemerintah melalui Bank Indonesia melaksanakan kebijakan memberikan kredit-kredit khusus, seperti : KIK, KMK, KCK, dan sebagainya, yang pendanaannya tidak berasal dari dana pihak ketiga akan tetapi disediakan langsung oleh BI. Kredit-kredit tersebut pelaksanaan penyalurannya banyak dilakukan melalui bank-bank milik pemerintah. Dengan demikian mudah dipahami kenyataan pada masa praderegulasi peranan bank-bank milik negara dalam perekonomian, baik dinyatakan dalam

besarnya porsi nilai kredit yang dipasoknya maupun dalam porsi aktiva yang dikuasainya adalah sangat besar.

Walaupun kebijakan deregulasi 1 Juni 1983 telah menyebabkan perkembangan yang pesat di sektor perbankan, namun masih terdapat kelemahan struktural yang menghambat perkembangan sistem keuangan ke arah yang lebih sehat dan efisien. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain ditandai dengan belum berkembangnya lembaga-lembaga keuangan diluar perbankan, terbatasnya jangkauan layanan perbankan, serta tingkat kesehatan dan efisiensi yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut pada tanggal 27 Oktober 1988 diambil kebijakan yang cukup mendasar dengan memberikan kesempatan bagi pendirian bank dan perluasan jaringan pelayanan bank diseluruh wilayah tanah air. Di samping itu bank juga didorong untuk mengembangkan produk-produk baru dalam memobilisasi dana pihak ketiga (masyarakat/lembaga keuangan) sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dominasi pemerintah.

Dengan terlaksananya kebijakan deregulasi khususnya paket 1 Juni 1983 dan 27 Oktober 1988 telah menjadikan persaingan antar bank, atau secara lebih luas juga persaingan antara lembaga-lembaga keuangan merupakan unsur lingkungan dunia bisnis perbankan yang harus disadari digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembalan keputusan di bidang perbankan. Persaingan untuk memaksimumkan keuntungan jangka panjang

khususnya dalam bidang perbankan, pihak bank minimum dituntut agar bank senantiasa memenuhi kriteria sebagai bank yang sehat. Untuk menentukan sehat tidaknya bank dapat dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank.

Bagi bank, likuiditas adalah soal yang sangat penting, karena bisnis bank adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan "harta tak terwujud" bagi bank akan sangat dipengaruhi oleh kesanggupan bank memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. (Drs. Wasis, 1992 : 53).

Bank dianggap likuid kalau bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan dana dengan cepat dari sumber yang lain. Sumber dana likuiditas bank dapat dipenuhi dengan penerimaan pendapatan, pembayaran kembali pinjaman, atau penerimaan uang masuk dari deposit (dana masyarakat) yang berupa tabungan, deposito, serta giro. Alternatif lain bagi untuk mendapatkan aktiva likuid adalah meminjam dana dari bank lain sesuai kebutuhan, seperti dana call money. Bagaimana sebuah bank melihat pilihan ini tergantung dari pada tersedinya dan biaya/bunga pinjaman. Jika sebuah bank mendapat jaminan bahwa ia dapat meminjam dalam jumlah yang besar pada setiap saat tanpa beban dan dengan biaya bunga yang rendah, maka bank akan mengandalkan sumber ini untuk likuiditasnya.

Ada baiknya bagi untuk mempertahankan jumlah likuiditas tertentu sesuai ketentuan cash ratio dari Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tak terduga atau keadaan darurat seperti : penarikan deposito yang tidak diperkirakan, pemogokan buruh yang berkepanjangan, ataupun industri lokal yang penting adalah suatu keadaan yang mempunyai akibat buruk atas deposito bank. Oleh karena itu, suatu cadangan likuiditas untuk melindungi integritas bank terhadap keadaan yang tak terduga sangatlah diharapkan.

Bank umum termasuk bank-bank umum milik pemerintah adalah bank yang berusaha mencari laba yang wajar dengan memperhatikan kendala likuiditas dan keamanan, maka diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaan dana yaitu memastikan kesanggupan bank untuk memenuhi tuntutan pemegang rekeningnya serta menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi keperluan kredit yang dibutuhkan nasabah bank dan masyarakat pada umumnya. Pemberian pinjaman merupakan kegiatan utama bank, karena akan mendapat penghasilan yang terbesar dari kegiatan ini, sehingga bisa menutup berbagai pengeluaran bank. Oleh karena itu kegagalan untuk memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah akan mengakibatkan kehilangan bisnis dan akhirnya, mungkin kegagalan bank sebagai organisasi yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pelaksanaan deregulasi perbankan telah mengakibatkan pangsa pasar bank-bank pemerintah menurun, walaupun begitu dalam hal aset dan kredit

peranan oligopolistik bank pemerintah tetap dominan. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan merupakan tantangan bagi bank pemerintah untuk lebih meningkatkan efisiensi dengan prinsip kehati-hatian, karena disamping operasinya untuk mencari laba, bank pemerintah juga berfungsi sebagai agen pembangunan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor: dana masyarakat, suku bunga call money, serta cash rasio terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000 ?
- 1.2.2. Apakah kebijakan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 berpengaruh positif terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh faktor-faktor seperti : dana masyarakat, suku bunga call money, serta cash rasio secara individu terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.

- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh faktor dana masyarakat, suku bunga call money, cash rasio, dan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 secara bersama-sama terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.
- 1.3.3. Adanya deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 berpengaruh positif terhadap likuiditas pada bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya dalam menjalankan usaha bank.
- 1.4.2. Dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan perbandingan peneliti selanjutnya.
- 1.4.3. Bagi peneliti dapat menerapkan dan menambah perbendaharaan pengetahuan praktis.

#### **1.5. Hipotesis**

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal ini dapat dikemukakan untuk mengarahkan suatu proses penarikan kesimpulan yang akan dilakukan sehingga diperoleh hasil yang valid sesuai yang diharapkan (Djarwanto ps, 1987 : 38).

Hipotesis penulis yang kemukakan adalah sebagai berikut :

- 1.5.1. Dana masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.
- 1.5.2. Suku bunga call money berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.
- 1.5.3. Cash rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.
- 1.5.4. Kebijakan deregulasi perbankan 27 Oktober 1988 berpengaruh positif terhadap likuiditas pada bank-bank umum milik pemerintah tahun 1984-2000.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada bank-bank umum milik pemerintah dari tahun 1984-2000.

### **1.6.2. Jenis data dan variabel yang diperlukan**

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Untuk pendekatan ini digunakan data runtut waktu (time series)

Adapun variabel yang diperlukan :

#### 1.6.2.1. Likuiditas Bank

Likuiditas bank merupakan suatu aset atau alat-alat likuid yang dapat dengan mudah diuangkan dengan sedikit atau tanpa resiko kerugian, yang mampu disediakan oleh bank guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman pada masyarakat yang memerlukan. Sehingga likuiditas bank dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Aset dapat disusun mulai dari aset yang paling likuid sampai yang paling tidak likuid. Aset likuid terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia.

#### 1.6.2.2. Dana masyarakat

Dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dana masyarakat terdiri dari : simpanan giro (demand deposit), simpanan deposito (time deposit), tabungan (saving). Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh si pemiliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedang pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank. Tabungan yang merupakan simpanan

masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan cara/syarat tertentu.

#### 1.6.2.3. Suku bunga call money

Call money adalah dana yang dipinjam oleh suatu bank dari bank lainnya yang jangka waktunya relatif pendek. Call money merupakan instrumen yang paling mudah dilakukan oleh bank-bank bila memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun biasa. Bagi bank, pemilihan call money sebagai dana likuiditas, sebagian tergantung dari tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga call money merupakan harga (biaya bunga) dana call money yang berlaku di pasar uang antar bank. Jika biaya bunga rendah maka bank mungkin sebagian besar akan mengandalkan call money untuk sumber likuiditasnya.

#### 1.6.2.4. Cash rasio (cadangan wajib)

Cash rasio adalah suatu likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Cash rasio merupakan instrumen tidak langsung dari kebijakan moneter, sejak Juni 1983 cash rasio ditetapkan 15% dari kewajiban yang segera dapat ditagih. Komponen dari kewajiban yang segera dapat ditagih adalah giro, deposito, tabungan, serta kewajiban jangka pendek lainnya. Berdasar

PAKTO 1988 cash rasio turun menjadi 2%, mulai Februari 1996 diubah menjadi giro wajib minimum sebesar 3%.

#### 1.6.2.5. Deregulasi perbankan

Deregulasi perbankan yang dipakai adalah paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27, 1988). Pakto 27, 1988 merupakan kebijakan pemerintah yang cukup mendasar, yang intinya memberikan kesempatan bagi pendirian bank dan perluasan jaringan pelayanan bank diseluruh wilayah tanah air, serta mendorong bank untuk mengembangkan produ-produk baru didalam memobilisasi dana pihak ketiga, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dominasi pemerintah.

#### 1.6.3. Sumber data

Data yang digunakan bersumber dari :

1.6.3.1. Laporan tahunan Bank Indonesia beberapa periode

1.6.3.2. Statistik ekonomi keuangan dari Bank Indonesia beberapa periode.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian dikumpulkan melalui pengamatan literatur disesuaikan pada variabel-variabel yang diperlukan. Kemudian data-data tersebut disusun secara sistematis, seksama dan logis disesuaikan

dengan analisa sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran secara umum mengenai masalah yang sedang diteliti.

#### 1.6.5. Analisa Data

Untuk pengujian terhadap hipotesis digunakan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan alat bantu berupa regresi linier berganda dengan model logaritma natural. Fungsi ekonomi dari likuiditas bank yaitu :

$$L = f(DM, i, CR, D),$$

Lalu dirumuskan model ekonometrikanya :

$$L = \beta_0 DM^{\beta_1} i^{\beta_2} CR^{\beta_3} D^{\beta_4} u^{ei}$$

Dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln L = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln DM + \beta_2 \ln i + \beta_3 \ln CR + \beta_4 D + e_i$$

Dimana :

L = Likuiditas Bank

DM = Dana Masyarakat

CR = Cash Rasio

i = Suku bunga call money

D = Variabel Dummy

D = 0, Berarti sebelum adanya paket 27 Oktober 1988

D = 1, Berarti sesudah adanya paket 27 Oktober 1988

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi uji statistik : uji t, uji f, serta uji  $R^2$ . Pengujian ini juga dilengkapi dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah hasil regresi yang diperoleh benar-benar memiliki sifat BLUE. Uji asumsi klasik ini meliputi : Multikolinieritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi.

## 1.7. Uji Statistik

Tahap pengujian :

### 1.7.1. Uji T

Yaitu pengujian tingkat signifikan masing-masing koefisien regresi yang diperoleh dari perhitungan atau dapat dikatakan sebagai uji masing-masing variabel secara individu.

Kriteria pengujian :

$$1.7.1.1. \quad H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 > 0$$

$$H_0 : \beta_2 \geq 0$$

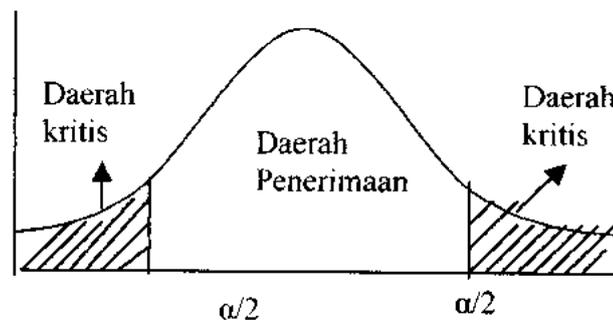
$$H_1 : \beta_2 < 0$$

$$H_0 : \beta_3 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_3 > 0$$

$$1.7.1.2. \quad \text{Derajat kebebasan : } \alpha/2, (n-k)$$

$$1.7.1.3. \quad \text{Daerah kritis}$$



Gambar 1.1 Selang keyakinan untuk  $t$

$$1.7.1.4. \quad t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_1}{Se(\beta_1)}$$

Di mana :

Jika  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti signifikan.

Jika  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak signifikan.

## 1.7.2. Uji F

Untuk menguji pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara bersama-sama atau menguji semua koefisien regresi secara serentak.

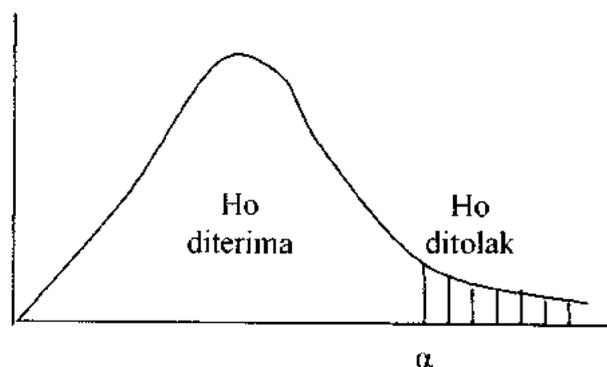
Kriteria pengujian :

$$1.7.2.1. \quad H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$1.7.2.2. \quad H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

$$1.7.2.3. \quad \text{Derajat kebebasan : } (n-k, k-1)$$

1.7.2.4. Daerah kritis :



Gambar 1.2 Selang keyakinan untuk  $f'$  satu sisi

$$1.7.2.5. \quad F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / N - K}$$

Di mana : Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas secara nyata.

### 1.7.3. Uji R

Yaitu untuk menguji tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas.  $R^2$  adalah koefisien determinasi yang menunjukkan berapa persen dari variabel tak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

## 1.8. Uji Pelanggaran Asumsi Klasik

### 1.8.1. Uji Multikolinieritas

Berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kolinieritas ganda di antara variabel bebas, yang pengujiannya dapat dilihat dengan menggunakan uji klein, yaitu cara membandingkan  $r^2_{x1,x2,\dots,xk}$  ( $R^2$  dari regresi

antar variabel bebas) dengan  $R^2 Y_{x1, x2, \dots, xn}$  ( $R^2$  secara keseluruhan). Jika  $R^2$  secara keseluruhan lebih besar dari  $r^2$  maka tidak terjadi masalah multikolinieritas. Atau multikolinieritas tidak membahayakan atau dapat diabaikan.

### 1.8.2. Uji Heteroskedastisitas

Dimaksudkan untuk menguji apakah varians kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel independen, yaitu :

$$E(X_i, e_i) = 0, \text{ sehingga } E(e_i)^2 = \delta^2$$

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastik dapat dilihat dengan menggunakan uji park yaitu hasil dari meregres nilai residu OLS yang telah dikuadratkan.

Untuk itu model regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_i^2 = \alpha + \beta \ln x_i + v_i$$

Apabila nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) dari persamaan di atas tidak signifikan maka menunjukkan homoskedastisitas, dan sebaliknya apabila  $\beta$  signifikan maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

### 1.8.3. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi serial di antara kesalahan pengganggu yang terdapat dalam model regresi linier berganda maka dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson/DW hasil perhitungan dengan DW tabel.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan Sumardi (Sumardi, 1986) tentang “*Campur tangan Bank Indonesia pada likuiditas bank dan implikasinya terhadap kredit perbankan*”, dengan variabel independen kredit likuiditas bank Indonesia dan dana masyarakat (giro dan deposito) , fungsi likuiditas adalah :

$$L = f(KLBI, Dm)$$

Dari fungsi likuiditas tersebut, likuiditas di ukur berdasar prosentase likuiditas terhadap kewajiban lancar/*reserve ratio*. Komposisi dana masyarakat meliputi giro dan deposito, sedang tabungan tidak diperhitungkan sebagai sumber dana likuiditas. Kalau dianalisa ternyata dana masyarakat mempunyai hubungan yang lemah dengan porsentase likuiditas bank-bank umum nasional. Korelasi antara kedua variabel menghasilkan nilai  $r$  (*korelasi product moment*) = -20,867% yang berarti porsentase likuiditas bank umum nasional tidak semata-mata dipengaruhi dana masyarakat.

Sedang kredit likuiditas dari BI mempunyai hubungan yang lemah dengan porsentase likuiditas bank-bank umum nasional, angka korelasi adalah  $r = -20,002\%$ , karena kredit likuiditas sendiri digunakan hanya sebagai

pelancar kredit terutama pada sektor yang diprioritaskan, sehingga bank hanya sebagai penyalur saja. Peran kredit likuiditas sebagai pembantu kesulitan likuiditas hanya sebagian kecil saja. Bank umum swasta nasional hanya mendapat bagian kecil dalam menerima bantuan kredit likuiditas BI.

Apabila dilihat dari peranan masing-masing bank-bank umum nasional, hubungan dana perbankan dan prosentase likuiditas :

- a. Untuk bank-bank umum pemerintah, dana masyarakat mempunyai hubungan erat negatif dengan prosentase likuiditasnya, dengan  $r$  korelasi = -84,7091%. Secara terperinci giro maupun deposito punya hubungan erat dengan prosentase likuiditas bank, masing-masing nilai  $r$  korelasi = -83,2656% untuk giro,  $r$  = -88,83% untuk deposito.
- b. Pada bank-bank umum swasta nasional dari keseluruhan dana masyarakat yang terdiri giro dan deposito terjadi hubungan yang erat sekali dengan prosentase likuiditasnya, terbukti dari analisa data diperoleh nilai  $r$  = -77,63% untuk giro dan  $r$  = -83,28% untuk deposito.

Dalam penelitian tersebut juga mengkaji kebijakan cash rasio dengan beberapa analisa, sebelum Desember 1977 cash rasio BI adalah 30% , setelah Desember 1977 turun menjadi 15%, masing-masing bila dinilai dalam rupiah didasarkan kewajiban lancar.

Perilaku bank-bank khususnya bank umum dalam menentukan likuiditas tidak dapat lepas dari ketentuan cash rasio tersebut. Perilaku

tersebut antara lain dalam menentukan likuiditas bank-bank umum melebihi dari angka cash rasio dari BI. Sehingga dapat diketahui fungsi likuiditasnya :

$$L = f(\text{CR})$$

Dari hasil analisa data diperoleh, untuk bank-bank umum milik pemerintah penentuan likuiditas diatas cash rasio mempunyai perbedaan significant yaitu untuk cash rasio 30% nilai t hitung 7,8999, untuk cash rasio 15% t hitung 3,991, masing- masing melebihi t tabel = 2,015. Sehingga diputuskan menolak  $H_0$  dan menerima hipotesa berarti menyatakan likuiditas bank-bank umum pemerintah (dalam %) lebih besar dari cash rasio BI.

Penelitian dilakukan oleh Iswardono Sp (Iswardono, 1993) dalam karyanya "Uang dan Bank" ,menyebutkan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 berpengaruh positif terhadap dana likuiditas bank terutama pada bank-bank umum nasional. Fungsi likuiditasnya :

$$L = f(i, DT)$$

Dengan menggunakan variabel independen tingkat bunga dan dana masyarakat khususnya tabungan dan deposito, diketahui setelah adanya deregulasi terjadi peningkatan suku bunga, terutama tingkat suku bunga deposito riil, semula negatif menjadi positif dan peningkatan pada dana masyarakat khususnya deposito.

Penelitian yang telah dilakukan Chairulfitri (Chairul, 1995) tentang "Efektifitas Paket Deregulasi 1 Juni 1983 terhadap Dana Likuiditas Bank-

Bank Umum Nasional Tahun 1972-1993”, variabel bebas yang digunakan adalah tingkat suku bunga tabungan dan pendapatan nasional, sehingga dapat diketahui fungsi likuiditas bank adalah :

$$L = f(y,i)$$

Dari analisa data dapat diperoleh bahwa dengan menjaga variabel lainnya tetap, jika pendapatan nasional ditambah 1% maka dana likuiditas akan naik sebesar 1,0011559%. Untuk variabel  $i$  jika ditambah 1% maka dana likuiditas akan naik sebesar 2,654204%.

Dalam penelitian tersebut juga menggunakan komposisi dana masyarakat (giro, deposito, tabungan/GDT) dan variabel dummy sebagai variabel independent. Sehingga fungsi likuiditas bank adalah :

$$L = f(GDT,D)$$

Hasil yang diperoleh adalah jika GDT ditambah 1% dengan menjaga variabel lain tetap, maka akan menaikkan dana likuiditas bank sebesar 0,5498680%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional, tingkat suku bunga, dan dana masyarakat mempunyai pengaruh yang meyakinkan terhadap dana likuiditas bank. Sedang untuk variabel dummy terlihat sebaliknya, yaitu apabila variabel dummy dalam hal ini adalah jika sama dengan 1 (satu), berarti setelah adanya deregulasi, maka terjadi penurunan dana likuiditas bank. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa pengaruh luar lainnya yang

sangat menentukan dalam dunia perbankan Indonesia. Beberapa pengaruh tersebut antara lain :

1. Sebelum adanya deregulasi

- a. Penurunan cash rasio dari 30% menjadi 15%
- b. Masih adanya pengaruh yang besar dari pemerintah dalam menentukan langkah perbankan, dimana saat terjadi “oil boom” bank-bank khususnya bank pemerintah mendapat dana segar berupa tabungan pemerintah, sedangkan tingkat bunganya ditentukan oleh pemerintah sendiri.

Setelah adanya deregulasi

- a. Mulai adanya kebebasan menentukan tingkat suku bunga khususnya pada bank-bank pemerintah lewat deregulasi 1 Juni 1983
- b. Keluarnya deregulasi sektor perbankan Oktober 1988 yang lebih banyak lagi memberikan kebebasan pada perorangan/swasta untuk mendirikan bank atau cabangnya, sekaligus mulai munculnya berbagai produk dan jenis layanan bank dengan berbagai hadiah yang meningkatkan minat masyarakat untuk menabung.
- c. Mulai tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan pembangunan, serta pasar modal yang lebih banyak memberikan pilihan bagi bank dalam menentukan uangnya akan diarahkan.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain, dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti mengambil obyek yang lebih spesifik yaitu pada bank-bank pemerintah, terutama dalam memobilisasi dana pihak ketiga yang secara langsung dapat mempengaruhi dana likuiditas bank. Fungsi likuiditas yang digunakan adalah :

$$L = f(Dm, i, CR, D)$$

Disini likuiditas tidak diukur berdasarkan persentase, tetapi berdasarkan uang atau alat likuid yang tersedia di bank. Dana masyarakat yang digunakan adalah giro, deposito, tabungan, sebagai sumber dana non tradisional yaitu dana antar bank (call money), terutama melalui peranan tingkat biaya bunga dalam mempengaruhi penggunaan dana tersebut. Sedangkan untuk kebijaksanaan cash rasio, cash rasio dinilai dalam rupiah yang didasarkan pada kewajiban lancar, yaitu sebesar 15%, 2% dan 3% dari kewajiban lancar. Dalam penelitian ini akan dikaji seberapa besar pengaruh/efektifitas kebijaksanaan cas rasio tersebut terhadap tinggi rendahnya dana likuiditas bank.

Dari penelitian ini diharapkan dapat mambarikan gambaran yang lebih luas lagi tentang peranan masing-masing sumber dana likuiditas bank, baik tradisional maupun non tradisional serta efektifitas kebijaksanaan cash rasio

terhadap dana likuiditas bank, terutama pada bank-bank pemerintah baik sebelum maupun sesudah adanya paket deregulasi 27 Oktober 1988.

## **2.2. Likuiditas Bank**

### **2.2.1. Pengertian Likuiditas Bank**

Likuiditas berarti kesanggupan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo. Bagi bank likuiditas dapat diartikan secara lebih spesifik yaitu kesanggupan bank menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali tagihan-tagihan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan.

Pengertian likuiditas dapat dilihat secara statis ataupun secara dinamis. Statis berarti tersedianya alat-alat likuid sebagai suatu persediaan yang selalu harus ada sekarang dan dinamis dalam arti kita tidak mengandalkan persediaan alat-alat likuid atau yang segera dapat dikonversi ke dalam alat-alat likuid, akan tetapi mengantisipasi kewajiban keuangan yang akan tiba dan bersamaan itu juga memproyeksikan alat-alat likuid yang akan masuk baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kredit. Pandangan yang pertama, yaitu yang statis dinamakan stock concept,

sedangkan pandangan yang kedua yaitu yang dinamis dinamakan flow concept.

Tidak dapat disangkal bahwa bagi bank likuiditas adalah soal yang sangat penting. Tingkat kepercayaan masyarakat yang merupakan "harta tak terwujud" bagi bank akan sangat dipengaruhi oleh kesanggupan bank memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Oleh karena itu pengendalian likuiditas merupakan hal yang sama sekali tidak dapat diabaikan dan harus diusahakan sungguh-sungguh. (Wasis, 1988; 51)

#### 2.2.2. Teori Manajemen Likuiditas Bank

Untuk menjaga posisi perusahaan agar tetap likuid, perusahaan harus menjaga likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Dalam dunia perbankan sering timbul pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi likuiditas yang tinggi, bank harus menggunakan dana yang seharusnya bisa dipinjamkan, digunakan untuk memperbesar cadangan primer. Dengan demikian kesempatan, untuk memperoleh keuntungan akan berkurang. Pengelolaan likuiditas dapat ditentukan dengan dua pendekatan yaitu *asset management* dan *liability management*. (Nopirin, 1986; 30)

a. Asset Management (Pengelolaan Kekayaan)

Asset management adalah pengelolaan kekayaan yang digunakan untuk alokasi dana/kekayaan untuk berbagai alternatif investasi. Dalam pengelolaan kekayaan ini ada beberapa pendekatan yaitu :

1) The Pool of Funds

Pengelolaan kekayaan dengan pendekatan pool of funds adalah dengan mengumpulkan semua sumber kekayaan menjadi satu dan diperlakukan sebagai dana tunggal tanpa membedakan sumber dananya. Dana yang sudah terkumpul menjadi satu akan dialokasikan ke berbagai bentuk kekayaan dengan kriteria tertentu. Bentuk alokasi dana tersebut adalah cadangan primer, cadangan sekunder, pinjaman, kekayaan lain dan investasi jangka pendek.

2) The Asset Allocation

Pada pendekatan ini sumber dana dikumpulkan menjadi satu tetapi masing-masing sumber dana dipertimbangkan sifat-sifatnya, tidak menjadi satu sumber dana tunggal. Alokasi dana ini berkaitan dengan sifat masing-masing sumber dana, untuk sumber dana yang perputarannya tinggi maka likuiditasnya juga tinggi.

3) Commercial Loan Theory

Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian besar kredit yang diberikan merupakan kredit jangka pendek.

4) The Shiftability Theory

Teori ini beranggapan bahwa suatu bank akan lebih terjamin likuiditasnya, jika bank yang bersangkutan memiliki asset yang dapat dipindahkan atau dapat dijual dengan cepat, seperti surat berharga bank sentral.

5) The Anticipated Income Theory

Menurut teori ini suatu likuiditas bank akan dapat dipertahankan, jika bank dapat merencanakan pembayaran kembali utangnya dengan pendapatan di masa yang akan datang.

b. Liability Management

Liability management adalah suatu proses yang mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit.

Teori ini menegaskan bahwa likuiditas sekarang bukanlah masalah yang berat. Dana akan mudah di peroleh dengan cara menaikkan tingkat bunga sertifikat deposito yang ditawarkan, atau melalui interbank call money market.

### 2.2.3. Pengukuran Likuiditas

Diakui mengukur likuiditas tidaklah mudah dan alat ukurnyapun tidak selalu tepat. Walaupun demikian, perlu dicari cara untuk mengukur apakah bank itu likuid atau tidak, atau minimal dapat dipergunakan sebagai indikator dan petunjuk ke arah kesulitan yang mungkin timbul sehubungan dengan masalah likuiditas.

Pada umumnya penulis mengemukakan dua ukuran, yaitu (Wasis,1988,56) :

#### a. Rasio antara pinjaman dan simpanan

Rasio ini menyatakan seberapa jauh bank telah mempergunakan uang para depositor untuk memberikan pinjaman kepada langganannya. Dengan kata lain jumlah yang digunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari para depositor. Dalam rasio ini jenis-jenis investasi non pinjaman diabaikan.

Berapa besarnya rasio, sehingga bank masih dianggap likuid tentunya tergantung ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan

pemerintah (bank sentral), yaitu yang menyangkut berapa besar bagian deposit harus ditahan dan berapa bagian dari deposit itu boleh dipakai sebagai dana yang dapat di investasikan pada pinjaman dan lain-lain.

Salah satu anggapan dasar dari rasio ini adalah bahwa pinjaman itu adalah salah satu komponen harta lancar yang paling tidak likuid, sehingga makin tinggi rasio, makin kecil kemungkinan suatu bank dapat memberikan pinjaman, maka kurang likuid. Sudah jelas bahwa rasio ini tidak sesuai dengan *liability management theory*, sebab tidak mempertimbangkan kredit yang bisa diambil guna mengatasi kemungkinan kesulitan likuiditas.

b. Rasio antara liquid assets dan deposit

Alat pengukur yang lain adalah perbandingan antara liquid assets dengan deposit, dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Liquid assets}}{\text{Deposit}}$$

Rasio antara alat likuid dengan deposit lebih luas dari yang pertama, karena disini dimasukkan semua unsur aset likuid, yang tentu meliputi pinjaman, uang kas, dan surat-surat berharga yang mudah dijual.

Menentukan kebutuhan likuiditas bank sudah jelas tidak begitu mudah. Persoalan ini tidak hanya dapat dipecahkan dengan rumus-rumus belaka. Jumlah likuiditas bank sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain kebijakan moneter pemerintah melalui penentuan cash rasio dan berbagai deregulasi, tingkat suku bunga, dana perbankan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas dibatasi pada faktor dana masyarakat, tingkat suku bunga call money, cash rasio, serta deregulasi Oktober 1988.

### **2.3. Kebijakan Ekonomi Moneter**

#### **2.3.1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Ekonomi Moneter**

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian secara makro sebagai suatu keseluruhan melalui penambahan dan pengurangan jumlah uang beredar dengan maksud agar perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan, seperti tingkat inflasi dan pengangguran, serta neraca pembayaran luar negeri yang terus menerus defisit (Soediyono, 1981 ; 55). Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan moneter termasuk dalam kebijakan ekonomi makro.

Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah pasti mempunyai tujuan tertentu. Begitu pula dengan kebijakan moneter tidaklah berbeda dengan tujuan dari kebijakan makro. Tujuan kebijakan moneter itu antara lain (Nopirin, 1984 ; 9) :

- a. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi.
- b. Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang mantap.
- c. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi.
- d. Keadaan perekonomian yang stabil, meliputi kestabilan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja.
- e. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang.
- f. Distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kebijakan moneter pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengendalian permintaan dan target moneter (Insukindro, 1995 ; 19).

Pengendalian permintaan dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi misalnya dilakukan dengan menjaga permintaan uang, barang dan jasa dapat dipertahankan pada tingkat yang tidak mendorong inflasi.

Target moneter atau lebih khususnya target jumlah uang beredar atau pengendalian jumlah uang beredar memang kebijakan murni.

Kebijakan yang dapat antara lain dengan menurunkan jumlah uang primer, menaikkan cadangan wajib, dan menaikkan suku bunga.

### 2.3.2. Instrumen Kebijakan Moneter

Alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan biasanya disebut instrumen kebijaksanaan. Adapun instrumen yang dipakai oleh bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian dibedakan menjadi (Nopirin, 1984 ; 38) :

#### a. Politik Pasar Terbuka

Meliputi tindakan menjual dan membeli surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini berpengaruh pertama menurunkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi, sebab dalam penjualan surat berharga, akibat menurunnya cadangan maka bank umum dapat mengurangi jumlah uang beredar (melalui proses penciptaan kredit). Kedua, tindakan pembelian dan penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga surat berharga, akibatnya tingkat bunga umum juga akan terpengaruh.

#### b. Politik Diskonto

Tindakan untuk merubah tingkat bunga yang dibayar oleh bank-bank umum dalam meminjam dana dari bank sentral. Dengan menaikkan diskonto maka ongkos meminjam dari bank sentral akan

naik sehingga mengurangi keinginan bank untuk meminjam, akibatnya jumlah uang beredar dapat ditekan.

c. Perubahan Cadangan Minimum (Cash Rasio)

Perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui proses penciptaan kredit. Apabila ketentuan cadangan minimum dinaikkan, jumlah uang beredar cenderung turun, sebaliknya bila cadangan minimum diturunkan maka jumlah uang beredar cenderung naik. Pemerintah menetapkan perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai dengan kewajiban segera dapat dibayar harus menghasilkan angka minimal 2% sebelum Pakto 1988.

d. Margin Requirement

Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan pembelian surat berharga, caranya dengan menetapkan jumlah minimum cash down payment untuk transaksi surat berharga.

e. Moral Suasion

Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter dengan pidato-pidato Gubernur BI atau publikasi agar bersikap seperti yang dikehendaki pemerintah.

### 2.3.3. Cash Rasio

Sebagai pedoman dalam pengukuran potensial likuiditas bank adalah adanya ketentuan cash rasio dari Bank Indonesia, sebagai salah instrumen kebijaksanaan moneter pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Cash rasio adalah likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Definisi dari minimum cash rasio adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai dengan kewajiban yang segera dibayar (*current liabilities*). Perbandingan tersebut harus menghasilkan minimum 2%, sesuai ketentuan Pakto 1988 yang menyebutkan Bank Indonesia menurunkan cash rasio dari 15% menjadi 2%. Kemudian mulai Februari 1996 cash rasio naik lagi menjadi 3%.

Rumus minimum cash rasio adalah (Soediyono, 1992; 120):

$$\frac{\text{alat-alat likuid yang dikuasai}}{\text{kewajiban segera dapat dibayar}} \times 100\% = 15\%$$

Setelah adanya Paket 27 Oktober 1988 :

$$\frac{\text{alat-alat likuid yang dikuasai}}{\text{kewajiban segera dapat dibayar}} \times 100\% = 2\%$$

Komponen alat-alat likuid yang dikuasai pada dasarnya adalah *primary reserve* yang terdiri dari uang kas dan saldo rekening uang di Bank Indonesia. *Primary reserve* ini adalah cadangan utama yang harus ada dan dipelihara oleh bank umum, demi memenuhi ketentuan yuridis

bank sentral. Selain itu pendekatan mengenai *primary reserve* diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari nasabah yang muncul secara tiba-tiba.

Di sisi lain, *secondary reserve* tidak diperhitungkan di dalam cash rasio tetapi digunakan untuk menyangga *primary reserve* atau usaha-usaha lain yang memperoleh earning assets, artinya bila saldo kas terus berkurang, demikian juga saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebagai akibat penarikan nasabah, maka *secondary reserve* akan muncul dipermukaan untuk memberikan bantuan. Bantuan ini dapat memperbaiki posisi likuiditas yang sudah terancam. Adapun dalam mewujudkan *secondary reserve* ini adalah pada pos-pos sebagai berikut (Muchdharsyah Sinungan, 1987; 154) :

- a. Wesel, cek, dan tagihan.
- b. Efek-efek termasuk sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang lainnya
- c. Call money (biasanya masuk dalam tagihan).

Untuk perhitungan cash rasio hanya uang cash dan saldo pada Bank Indonesia saja yang dianggap likuid. Namun, secara teoritis masih ada lagi komponen alat-alat likuid yang dikuasai, yaitu saldo giro pada bank lain, di samping saldo jaminan kliring, jumlahnya telah termasuk ke dalam saldo rekening Bank Indonesia. Komponen kewajiban yang

segera dapat dibayar sebelum Pakto 1988 dibedakan berdasarkan kategori bank tersebut.

#### 2.3.4. Pengaruh Cash Rasio Terhadap Likuiditas Bank

Di sini yang mempunyai wewenang menetapkan ketentuan-ketentuan di bidang likuiditas adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang dasar perbandingan minimum antara jumlah alat-alat yang dikuasai serta jumlah kewajiban yang segera dapat dibayar. Hal tersebut untuk menjaga jika nasabah menarik simpanan setiap saat maka bank juga harus melayani tepat pada waktunya. Jika yang ditarik hanya sebagian kecil dari simpanan giro dan pada hari yang sama banyak juga nasabah menyetor uang di bank maka alat likuid tidak dibutuhkan tetapi jika penarikan lebih besar dari penyetoran maka persediaan alat-alat likuid sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketetapan cash rasio mempunyai pengaruh positif terhadap likuiditas bank. Sebab jika persentase cash rasio semakin besar maka cadangan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas semakin besar, sedangkan dana untuk pemberian kredit / pinjaman akan berkurang, sehingga tingkat profitabilitas bank juga berkurang.

Likuiditas dengan perumusan cash rasio sebenarnya merupakan cadangan esensiil untuk dapat menjamin pembayaran kembali simpanan

yang sewaktu-waktu dapat diambil. Surplus atas cash rasio digunakan bank sebagai potensi untuk memberikan kredit perbankan di samping keperluan untuk biaya operasional bank.

## **2.4. Dana Perbankan**

### **2.4.1. Sumber Dana Likuiditas Bank**

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak digunakan menyalurkannya kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang dapat dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan volume dana yang dapat dikembalikan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman yang menghasilkan.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi bank ada tiga, yaitu (Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Pasal 32 ayat 2 dan 3) :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, berbentuk bank maupun non bank.

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional kita sebut giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman.

Lebih lanjut akan dibahas tentang sumber likuiditas yang berasal dari masyarakat yang berupa giro, deposito, tabungan serta dana yang berasal dari lembaga keuangan.

- a. Dana Masyarakat

Dana berasal dari masyarakat ini merupakan tulang punggung dari dana yang diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional berasal dari:

- 1) Simpanan giro (demand deposit).
- 2) Simpanan deposit (time deposit).
- 3) Tabungan (saving).

Ketiga simpanan dana masyarakat tersebut hanya dibedakan dalam cara penarikan oleh pemiliknya. Pada simpanan giro, pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan bank. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.

Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung kepada pertumbuhan dunia perbankan. Ternyata pada saat ini simpanan deposit memiliki porsi terbesar dalam sumber pendanaan, hal ini berakibat juga dalam kenaikan biaya dana, sebab bunga deposit tentunya lebih mahal di banding jasa giro maupun bunga tabungan. Perbedaan balas jasa (bunga) antara berbagai jenis instrumen simpanan masyarakat mencerminkan ciri-ciri khusus masing-masing instrumen menyimpan kekayaan itu. Perbedaan balas jasa tersebut yang dinyatakan dalam mata uang sama mencerminkan perbedaan likuiditas masing-masing instrumen, perbedaan resiko, perbedaan perlakuan pajak, dan lain sebagainya.

Semakin likuid dan semakin rendah resiko suatu instrumen simpanan masyarakat, semakin rendah balas jasanya. Tabungan yang lebih likuid dari deposito berjangka, menjanjikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari deposito berjangka.

b. Dana yang berasal dari lembaga keuangan

Pada umumnya dana yang berasal dari lembaga keuangan ini diperoleh bank sebagai pinjaman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan bank peminjam. Lembaga keuangan di sini diartikan secara luas yaitu yang berbentuk bank maupun bukan bank. Demikian pula dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang termasuk berasal dari lembaga keuangan bank antara lain :

1) Kredit likuiditas Bank Indonesia

Dana ini diberikan Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas. Pinjaman serta kredit likuiditas ini diberikan dengan cara :

- a) Menerima sebagai jaminan surat berharga.
- b) Menerima aksep.
- c) Menerima penggadaian ulang.

Apabila bank-bank mengalami kesulitan likuiditas (dalam keadaan darurat), mereka dapat minta bantuan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan kredit likuiditas darurat.

## 2) Pinjaman Antara Perbankan

Dalam dunia perbankan lazim terdapat kerjasama dalam berbagai bentuk antar lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga ahli (konsultan) ataupun dalam bentuk modal kerja/kapital. Bantuan modal lazimnya diberikan sebagai pinjaman, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas maupun pemberian kredit.

Bank-bank sekarang menyadari bahwa permintaan kredit bisa dibeli dengan cara membeli likuiditas di pasar uang. Bank tidak lagi tergantung pada sumber-sumber tradisional (giro, deposito, atau tabungan). Pemenuhan likuiditas bisa melalui sumber-sumber non tradisional seperti pinjaman antar bank, penjualan sertifikat deposito, penerbitan surat berharga di pasar uang, serta kemungkinan sumber dana lainnya. Hal tersebut sesuai dengan teori *liability management* bahwa untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non tradisional melalui

pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen uang.

Pinjaman antar bank dapat berbentuk deposit on call maupun call money, tergantung jangka waktu pinjaman. Deposit on call merupakan pinjaman tanpa batas waktu dalam arti setiap saat dapat diambil dengan pemberitahuan dahulu.

Call money adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap saat dapat ditarik tanpa pembebanan. Call money ini justru suatu lembaga yang paling mudah dilakukan bank-bank apabila memerlukan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

Pinjaman antar bank yang berupa call money ini dapat dilakukan di pasar uang yang terorganisir, yaitu pasar uang antar bank (*interbank call money market*). Pasar uang antar bank ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana-dana bank misalnya :

- a) Bank-bank yang sangat memerlukan tambahan dana untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan/atau untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan likuiditas.

- b) Bank-bank yang kelebihan dana (idle) dapat menjadikan dana tersebut sebagai earning assets dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam untuk waktu yang relatif pendek.

Penawaran dan permintaan dana dapat dilakukan langsung antara masing-masing pihak untuk mempermudah transaksi, maka pihak yang menawarkan maupun pihak yang melakukan permintaan dana dapat menggunakan lembaga keuangan bukan bank yang telah mendapat ijin pemerintah, sebagai perantara (broker).

Transaksi dalam pasar uang antar bank ini merupakan transaksi yang jangkanya sangat pendek, yang harus di bayar kembali setelah beberapa hari dan jangka waktu paling lama (termasuk perpanjangan) ditetapkan tujuh hari terhitung sejak penutupan transaksi yang pertama. Apabila melewati hari ketujuh pinjaman belum juga diselesaikan maka pinjaman tersebut harus diperlakukan sebagai pemberian kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan formal mengenai pemberian kredit.

#### 2.4.2. Pengaruh Dana Perbankan Terhadap Likuiditas Bank

Dana perbankan dalam penelitian ini adalah dana masyarakat yang berupa tabungan, giro, serta deposito, dan dana yang berasal dari pinjaman antar bank berupa dana call money.

Dana masyarakat merupakan sumber dana yang dominan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dana masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap besar kecilnya dana likuiditas bank. Apabila bank berhasil menghimpun dana masyarakat ini dalam jumlah yang besar maka dana likuiditas bank juga akan semakin besar.

Seperti yang telah disebutkan diatas, dalam teori liabiliti manajemen, bahwa dana bank tidak lagi tergantung pada dana deposito, giro, serta tabungan, pemenuhan likuiditas juga dapat dipenuhi dengan dana call money yang berasal dari pinjaman bank lain. Semakin besar dana call money yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, maka likuiditas bank semakin terjaga. Tetapi penggunaan dana call money ini sebagai alternatif pendanaan masih tergantung berbagai faktor antara lain tersedianya dana serta tingkat suku bunga call money.

#### 2.5. Tingkat Suku Bunga Bank

Setelah deregulasi 1 Juni 1983, baik tingkat suku bunga deposito maupun tingkat suku bunga kredit terus menerus mengalami peningkatan.

Peningkatan tingkat bunga di pasar dalam negeri yang lebih cepat dari peningkatan tingkat bunga di luar negeri memperbesar disparatis tingkat bunga antara kedua pasar uang itu (Anwar Nasution, 1991; 128).

#### 2.5.1. Teori Tingkat Suku Bunga

Teori tingkat suku bunga merupakan bagian yang paling lemah dalam kerangka teori ekonomi mikro. Tingkat suku bunga dalam teori ekonomi klasik, yang beranjak dari teori ekonomi mikro, merupakan balas jasa modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dipadukan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitutif. Semakin langka modal semakin tinggi tingkat suku bunga.

Tingkat suku bunga ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran akan *leodable funds* (Anwar Nasution, 1991; 133). Teori ini merupakan cabang dari teori ekonomi klasik. Komponen penawaran *leodable funds* terdiri tabungan nasional, surplus neraca pembayaran luar negeri, serta tambahan kredit dalam negeri otoritas moneter. Permintaan akan *leodable funds* terdiri dari permintaan masyarakat untuk keperluan investasi maupun untuk menahan uang tunai. Dengan demikian, semakin besar tambahan kredit dalam negeri otoritas moneter serta surplus neraca pembayaran luar negeri, semakin besar tambahan *leodable funds* sehingga dapat menurunkan tingkat bunga.

Berbeda dengan teori ekonomi klasik, dalam teori Keynes, tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil dan sektor moneter.

Seperti halnya dengan teori ekonomi klasik, tingkat suku bunga dalam teori Keynes, dapat diturunkan dengan cara menambah kredit dalam negeri otoritas moneter maupun dengan mengimpor uang dari luar negeri.

McKinnon (1973) mencoba menjelaskan tingkat suku bunga di negara-negara berkembang. Ia mengasumsikan bahwa lembaga keuangan di negara berkembang belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sebagai perantara antara penabung dan investor. Oleh karena itu investor di negara berkembang menabung dulu baru kemudian dapat melakukan investasi membeli barang modal. Berbeda dengan teori ekonomi klasik, barang modal dalam teori McKinnon tidak dapat dibagi-bagi dalam unit kecil. Dengan demikian hubungan antara barang modal dan uang dalam teori McKinnon adalah bersifat koplementer dan bukan seperti dalam teori ekonomi klasik

Untuk dapat merangsang mobilisasi tabungan, menurut McKinnon, maka tingkat suku bunga riil harus positif. Tingkat suku bunga riil adalah tingkat suku bunga nominal setelah dikoreksi dengan tingkat laju inflasi. Agar dapat menciptakan suku bunga riil positif,

maka tingkat suku bunga nominal harus lebih tinggi dari tingkat laju inflasi. Dengan demikian, masalah pengendalian laju tingkat inflasi atau stabilisasi tingkat-tingkat harga sangat penting dalam teori McKinnon. Ini berbeda dengan ajaran strukturalis yang jika perlu, membelanjai pembangunan untuk mengubah struktur ekonomi di negara-negara berkembang melalui pencetakan uang.

Berbagai teori diatas memberikan saran kebijaksanaan yang saling berbeda. Teori ekonomi klasik dan McKinnon menyarankan agar negara-negara berkembang meningkatkan suku bunganya setinggi mungkin. Saran teori ekonomi klasik di dasarkan atas asumsi atas langkanya barang-barang modal di negara-negara berkembang. Dalam teori *leonable funds* dan teori McKinnon tingkat suku bunga yang mahal itu dapat untuk memobilis tabungan nasional. Sebaliknya, berbeda dengan saran kebijaksanaan kedua teori diatas, teori Keynes menganjurkan untuk menetapkan tingkat suku bunga serendah mungkin agar dapat merangsang peningkatan pengeluaran investasi. Pada gilirannya, peningkatan investasi dapat meningkatkan produksi nasional dan menciptakan lapangan tenaga kerja. Kelemahan pokok dari semua teori itu, bahwa tidak satu diantaranya pun dapat memberikan petunjuk berapa besarnya tingkat bunga yang paling optimal.

### 2.5.2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Likuiditas Bank

Berdasarkan teori tingkat suku bunga leonable funds dan teori McKinnon disimpulkan bahwa tingkat suku bunga bank merupakan faktor yang paling menentukan dalam mobilisasi dana perbankan. Semakin tinggi tingkat bunga, dana yang dihimpun akan semakin besar. Dana yang dihimpun dapat digunakan bank untuk mengembangkan volume usahanya yang dapat memberikan profit maupun untuk memenuhi likuiditas yang bersifat non profit.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa dana antar bank terutama dana call money sangat menentukan jumlah likuiditas, namun penggunaan dana tersebut sebagai alternatif sumber dana likuiditas, sangat di pengaruhi biaya (bunga) dana tersebut. Dengan demikian tingkat suku bunga call money secara tidak langsung dapat mempengaruhi jumlah likuiditas bank. Sebab bila biaya bunga dana call money rendah maka bank akan lebih banyak menggunakan dana call money sebagai sumber likuiditas, sehingga likuiditas semakin terjaga. Jika terjadi sebaliknya, tingkat suku bunga dana call money tinggi, maka dana yang digunakan sedikit.

## 2.6. Deregulasi Perbankan

### 2.6.1. Makna Deregulasi

Makna deregulasi sering disamakan dengan privatisasi atau swastanisasi. Savas (1987), misalnya mengartikan privatisasi sebagai kebijaksanaan yang mengurangi peranan pemerintah, atau meningkatkan peranan swasta, baik dalam keadaan perekonomian maupun dalam pemilikan aktiva atau kekayaan ekonomi. Sebaliknya, Waterson (1988) membedakan pengertian yang menyangkut tindakan kebijaksanaan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan dunia usaha dalam tiga kelompok, yakni : privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi. Swastanisasi atau privatisasi adalah penjualan atau pemindahan hak milik badan usaha negara pada pihak swasta. Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Liberalisasi diartikan sebagai pengendoran atas berbagai pembatasan yang mengatur pendirian usaha baru untuk masuk pada suatu cabang kegiatan ekonomi (*market entry*)

Pengertian deregulasi dalam bahasa Indonesia nampaknya mencampuradukkan ketiga pengertian diatas. Dengan menggunakan pengertian Waterson, deregulasi di sektor keuangan tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 27) dan 20 Desember 1988 (Pakdes 20) menyangkut

sekaligus deregulasi dan liberalisasi. Hingga sekarang ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan menjual saham bank-bank milik negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah) pada masyarakat.

Bercampur aduknya pengertian dalam bahasa Indonesia akan istilah deregulasi, antara lain karena kita sangat alergi terhadap perkataan “liberalisasi” . Liberalisasi kita artikan dalam konotatif negatif sebagai persaingan bebas tanpa aturan dimana akan terjadi eksploitasi oleh golongan yang kuat terhadap golongan yang lemah ataupun kebebasan tanpa aturan yang menjurus pada anarki sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional.

#### 2.6.2. Alasan Deregulasi

Savas (1987) membedakan empat alasan untuk melakukan deregulasi. Alasan yang pertama adalah alasan pragmatis. Kesulitan anggaran, yang ditandai dengan defisit anggaran negara yang semakin besar, menuntut pengurangan kegiatan negara dan meningkatkan efisiensi serta produktifitasnya. Usaha untuk meningkatkan penerimaan maupun pinjaman negara memerlukan waktu tantangan politik. Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor negara itu berlaku bagi BUMN dan BUMD. Dimana hal tersebut dapat menyumbang pada peningkatan produktivitas ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan pembelanjaan maupun kegiatan usahanya pada

anggaran dan sektor negara. Dengan perkataan lain, sasaran dari alasan pragmatis ini adalah untuk mendorong sektor negara ke arah yang lebih baik.

Alasan kedua yaitu alasan ideologi, yakni mengurangi peranan sektor negara yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat. Sektor negara yang terlalu besar mencerminkan etatisme sehingga mengurangi kebebasan individu dan demokrasi. Pengambilan keputusan di sektor negara lebih banyak di dasarkan atas pertimbangan politik yang kurang efisien dan kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan pengambilan keputusan melalui mekanisme pasar.

Alasan ketiga adalah alasan komersial agar lebih banyak kegiatan ekonomi di serahkan kepada sektor swasta. Sebagian kegiatan pemerintah dan BUMN serta BUMD dapat diserahkan pada sektor swasta karena bukan merupakan kegiatan yang unik atau yang dapat dilakukan pemerintah secara lebih efisien.

Alasan yang keempat adalah alasan populis dimana masyarakat diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri, mengidentifikasi kebutuhannya, dan memenuhi sendiri kebutuhan tersebut.

### 2.6.3. Tujuan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988

Sebagai mana telah dijelaskan oleh pemerintah, Pakto 1988 adalah bagian dari kebijaksanaanya untuk memobilisasi tabungan nasional, meningkatkan efisiensi lembaga keuangan, dan merasionalisir alokasi sumber ekonomi. Upaya untuk meningkatkan mobilisasi tabungan nasional itu sangat penting terutama setelah penurunan harga minyak bumi dan meningkatkan beban pembayaran hutang luar negeri dewasa ini. Dengan perkataan lain, deregulasi di Indonesia adalah terutama karena alasan pragmatis, menurut klasifikasi Savas di atas.

Dalam sistem perkreditan yang didasarkan pada pagu, kredit selektif, dan subsidi bunga dimasa lalu, pemerintah melakukan alokasi langsung kredit perbankan. Represi kredit perbankan seperti ini telah menimbulkan distorsi alokasi sumber keuangan dan sekaligus menghambat mobilisasi tabungan dan pengembangan sistem keuangan nasional. Alokasi langsung seperti ini mulai berkurang sejak deregulasi 1 Juni 1983 dan diharapkan semakin berkurang setelah Pakto 1988.

Sejak Deregulasi 1 Juni 1983 itu, peranan pasar semakin menonjol dalam mobilisasi dana dan alokasi kredit. Dalam kaitan yang terakhir ini, melalui Pakto 1988, Pemerintah mengharap agar lembaga ekonomi nasional, khususnya dalam membelanjai kegiatan yang menyangkut upaya untuk meningkatkan ekspor non migas.

Untuk mengoreksi struktur industri perbankan, yang didominasi lima bank umum pemerintah, Pakto 1988 mengundang partisipasi swasta (termasuk swasta asing dan campuran) yang lebih besar dalam industri keuangan nasional. Selain menambah jumlah bank dan meningkatkan persaingan antar sesama lembaga keuangan, peningkatan efisiensi sistem keuangan didorong oleh Pakto 1988 melalui internasionalisasi pasar uang dan modal nasional.

Dalam rangka internasionalisasi pasar uang dan modal nasional itu, pemerintah meningkatkan peranan lembaga keuangan dan modal asing, mempermudah ijin bank devisa, mempermudah penggunaan fasilitas swap valuta asing dan memperjuangkan jangka waktunya, serta meniadakan pagu pinjaman luar negeri perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.